



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanyalah untuk Allah SWT, Robb pendidik kalbu manusia. Shalawat serta salam terlimpah ruah kepada Nabi penyempurna akhlak pembawa rahmat bagi sekalian alam Muhammad SAW.

Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. LKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dalam penyusunan LKIP ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang yakni hal tersebut merupakan pertolongan Allah SWT. Untuk itu Jazakumullahu Khoiron Katsiron penulis ucapkan Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan LKIP ini.

Singaparna, Desember 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya



dr. H. HERU SUHARTO, M.M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670709 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas	3
C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	6
D. Isu Strategis	32
E. Sistematika Penulisan	35
BAB II PERENCANAAN KINERJA	36
A. Rencana Strategis (Renstra)	36
B. Rencana Kerja (Renja)	38
C. Perjanjian Kinerja	47
D. Rencana Anggaran Tahun 2024	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	56
A. Capaian Kinerja Organisasi	56
B. Realisasi Anggaran	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	8
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Menurut Unit Kerja Dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	10
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Menurut Unit Kerja dan Golongan pada Tahun 2024	11
Tabel 1.4 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	12
Tabel 1.5 Jumlah Poliklinik di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	17
Tabel 1.6 Daftar Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	21
Tabel 1.7 Status Akreditasi Puskesmas Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	23
Tabel 1.8 Jumlah dan Kondisi Puskesmas Pembantu Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	25
Tabel 1.9 Jumlah Pusling Roda 4 dan Roda 2 serta Ambulans Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	26
Tabel 1.10 Jumlah Posyandu dan Stratifikasinya di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	28
Tabel 1.11 Jumlah Polindes di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	30
Tabel 1.12 Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Tahun 2024....	31
Tabel 1.13 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya	33
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya	38

Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	40
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya	48
Tabel 2.4 Pagu Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	49
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	56
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	57
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Tahun 2024	57
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2021, 2022 dan 2023	58
Tabel 3.5 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Program Tahun 2024 dengan Tahun 2021, 2022 dan 2023	59
Tabel 3.6 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Target Terakhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	60
Tabel 3.7 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Program Dengan Target Terakhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	60
Tabel 3.8 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Standar Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	62
Tabel 3.9 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Program Dengan Standar Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	62
Tabel 3.10 Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	65
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	73
Tabel 3.12 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023	13
Grafik 1.2 Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023	13
Grafik 1.3 Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023	13
Grafik 1.4 Rasio Perawat per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023	14
Grafik 1.5 Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023	14
Grafik 1.6 Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023	14
Grafik 1.7 Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023	15
Grafik 1.8 Rasio Tenaga Gizi per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 – 2023	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.....	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good government* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan, cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi dan kolusi.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur pemerintah, bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada instansinya.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP), wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

LKIP dapat dimanfaatkan untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

Adapun informasi yang diharapkan dari laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Tugas Pokok : **“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan”**.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

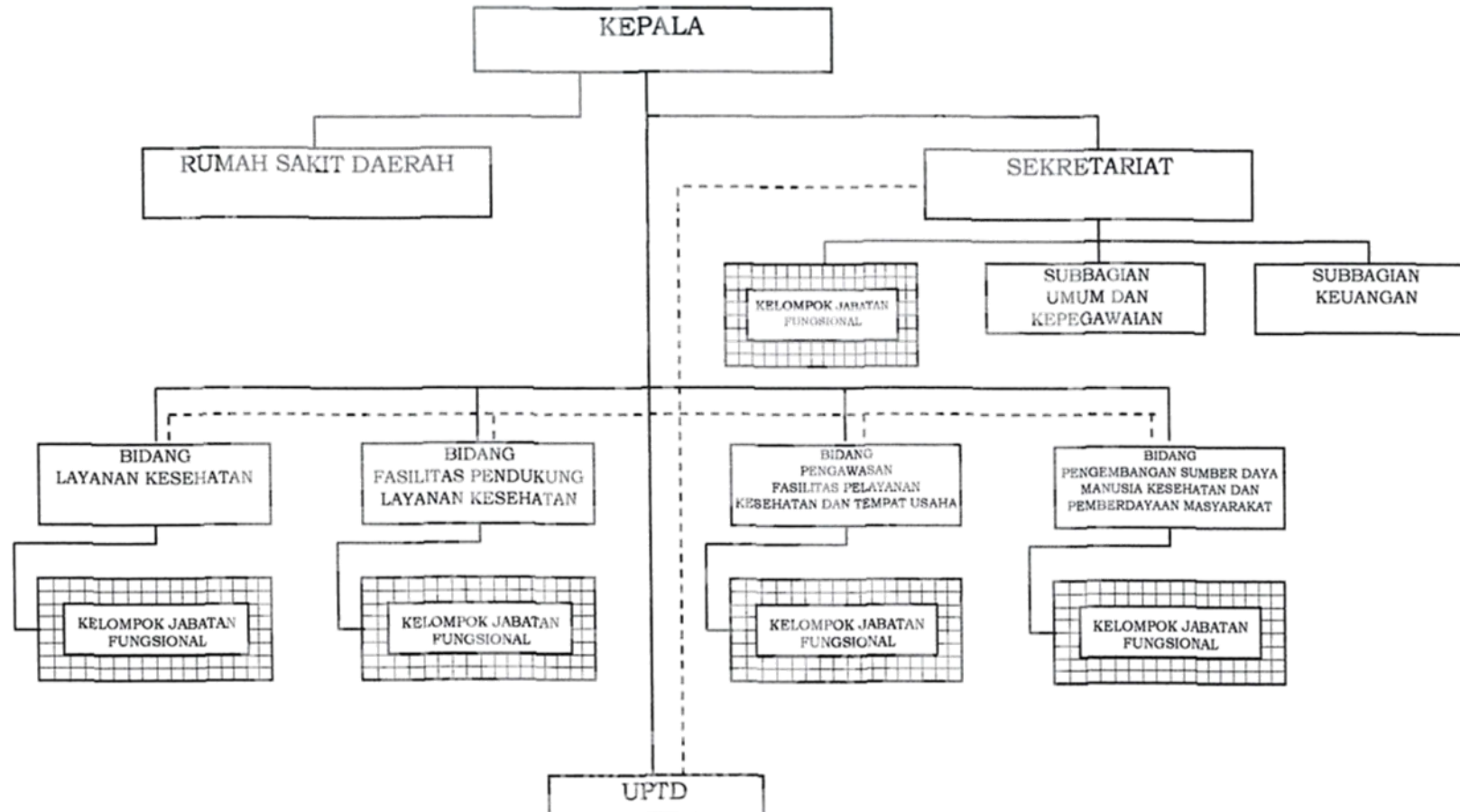
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Kemudian berdasarkan Peraturan

Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri atas
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan
3. Bidang Layanan Kesehatan
4. Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan
5. Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempa Usaha
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Rumah Sakit Daerah; dan
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Dinas Kesehatan sebagaimana pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya



C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

1. Aspek Kepegawaian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sumber daya manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Tenaga medis dikelompokkan ke dalam;
 - 1) Dokter
 - a) Dokter
 - b) Dokter Spesialis
 - c) Dokter Subspesialis
 - 2) Dokter Gigi
 - a) Dokter Gigi
 - b) Dokter Gigi Spesialis
 - c) Dokter Gigi Subspesialis
- b. Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam;
 - 1) Tenaga Psikologi Klinis;
 - 2) Tenaga Keperawatan;
 - d) Perawat Vokasi
 - e) Perawat Ners
 - f) Perawat Vokasi Spesialis
 - 3) Tenaga Kebidanan;
 - a) Bidan Vokasi
 - b) Bidan Ners
 - 4) Tenaga Kefarmasian;
 - a) Vokasi Farmasi
 - b) Apoteker

- c) Apoteker Spesialis
- 5) Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 - a) Tenaga Kesehatan Masyarakat
 - b) Epidemiolog Kesehatan
 - c) Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku
 - d) Pembimbing Kesehatan Kerja
 - e) Tenaga Administratif Dan Kebijakan Kesehatan
- 6) Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 - a) Tenaga Sanitasi Lingkungan
 - b) Entomolog Kesehatan
- 7) Tenaga Gizi;
 - a) Nutrisionis
 - b) Dietisien
- 8) Tenaga Keterampilan Fisik;
 - a) Fisioterapis
 - b) Terapis Okupasional
 - c) Terapis Wicara
 - d) Akupunktur
- 9) Tenaga Keteknisian Medis;
 - a) Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan
 - b) Teknisi Kardiovaskuler
 - c) Teknisi Pelayanan Darah
 - d) Optometris
 - e) Teknisi Gigi
 - f) Penata Anestesi
 - g) Terapis Gigi Dan Mulut
 - h) Audiologis
- 10) Tenaga Teknik Biomedika;
 - a) Radiografer
 - b) Elektromedis

- c) Tenaga Teknologi Laboratorium Medik
 - d) Fisikawan Medik
 - e) Ortotik Prostetik
 - 11) Tenaga kesehatan tradisional; dan
 - a) Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu
 - b) Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
 - c) Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
 - 12) Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
 - c. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- Jumlah pegawai yang bertugas di Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	13	12	25
3	Bidang Layanan Kesehatan	10	19	29
4	Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan	2	3	5
5	Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha	3	5	8
6	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	5	10
7	UPTD Farmasi	3	7	10
8	UPTD Labkesda	8	8	16
9.	RSUD Cikatomas	12	21	33
10.	RSUD Singaparna Medika Citra Utama	185	307	492
11	UPTD Puskesmas	552	1413	1965
JUMLAH		794	1800	2594

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
Kab.Tasikmalaya Tahun 2024

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menurut unit kerja dan jenjang pendidikan, unit kerja dan golongan pada Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Menurut
Unit Kerja Dan Jenjang Pendidikan Pada Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah	Tingkat Pendidikan								Jumlah
			S3	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	25	0	6	9	8	0	2	0	0	25
3	Bidang Layanan Kesehatan	29	0	10	11	7	0	1	0	0	29
4	Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan	5	0	1	3	1	0	0	0	0	5
5	Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha	8	0	3	4	1	0	0	0	0	8
6	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	10	0	3	6	0	0	1	0	0	10
7	UPTD Farmasi	10	0	1	6	2	0	1	0	0	10
8	UPTD Labkesda	16	0	2	8	6	0	0	0	0	16
9.	RSUD Tani Nelayan Tasikmalaya	33	0	4	17	12	0	0	0	0	33
10.	RSUD Singaparna Medika Citrautama	492	0	32	181	279	0	0	0	0	492
11.	UPTD Puskesmas	1965	0	23	668	1256	0	18	0	0	1965
JUMLAH		2594	0	86	913	1572	0	23	0	0	2594

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab.Tasikmalaya Tahun 2024

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
Menurut Unit Kerja dan Golongan pada Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah	Tingkat Pendidikan																
			Golongan IV					Golongan III				Golongan II				Golongan I			
			A	B	C	D	E	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Kepala Dinas	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sekretariat	25	3	1	0	0	0	4	5	2	2	0	0	1	7	0	0	0	0
3.	Bidang Layanan Kesehatan	29	5	1	0	0	0	8	1	2	8	0	0	0	4	0	0	0	0
4.	Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan	5	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha	8	2	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
6.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	10	2	0	0	0	0	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	UPTD Farmasi	10	2	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0
8.	UPTD Labkesda	16	1	1	0	0	0	1	3	2	4	0	0	0	4	0	0	0	0
9.	RSUD Tani Nelayan Tasikmalaya	33	5	1	0	0	0	3	9	3	8	0	0	1	3	0	0	0	0
10.	RSUD Singaparna Medika Citrautama	492	21	10	7	0	0	18	113	36	40	0	0	2	245	0	0	0	0
11.	UPTD Puskesmas	1965	65	113	32	0	0	219	363	156	282	0	0	2	733	0	0	0	0
	Jumlah	2594	107	127	40	0	0	260	497	206	353	0	0	6	998	0	0	0	0

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab.Tasikmalaya Tahun 2024

Bersumber data Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan, data dari Puskesmas, data dari RSUD Singaparna Medika Citra Utama dan data dari RSIA Respati, maka jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 tampak pada Tabel 1.4 di bawah ini.

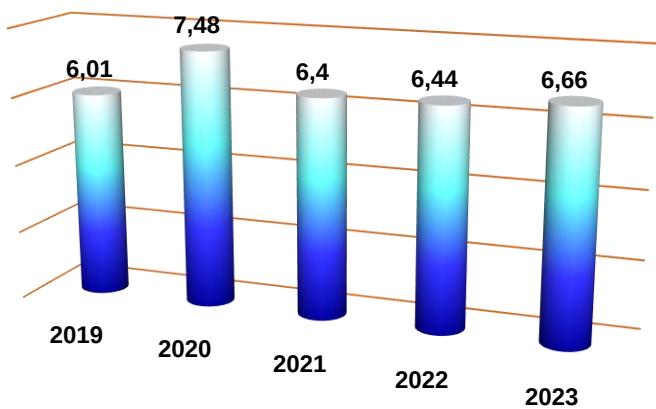
Tabel 1.4
Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2023

No	Tenaga Kesehatan	Puskesmas	RSUD SMC	RSIA Respati	Jumlah
1	Dokter Spesialis	0	28	5	33
2	Dokter Umum	91	28	8	127
3	Dokter Gigi	26	3	0	29
4	Dokter Gigi Spesialis	0	1	0	1
5	Perawat	710	291	33	1.034
6	Bidan	952	111	18	1.081
7	Kesehatan Masyarakat	105	14	3	122
8	Kesehatan Lingkungan	36	5	0	41
9	Gizi	53	7	1	61
10	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	74	32	0	106
11	Tenaga Teknik Biomedik Lainnya	0	0	0	0
12	Keterapian Fisik	0	2	0	2
13	Keteknisian Medik	111	16	0	127
14	Tenaga Teknis Kefarmasian	20	23	4	47
15	Apoteker	51	17	1	69
Jumlah		2.229	578	73	2.880

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2023

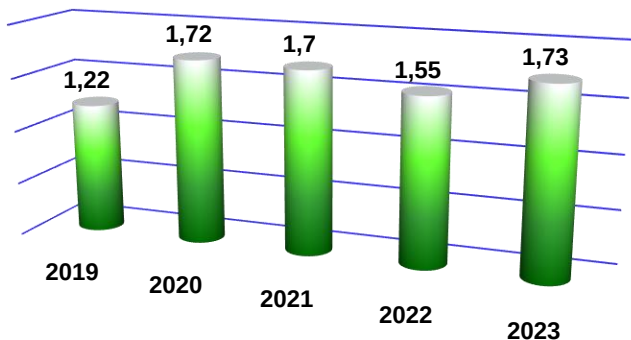
Dengan mengacu pada panduan Definisi Operasional Profil Kesehatan, maka rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 1.1
Rasio Dokter per 100.000 Penduduk
Di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019 – 2023



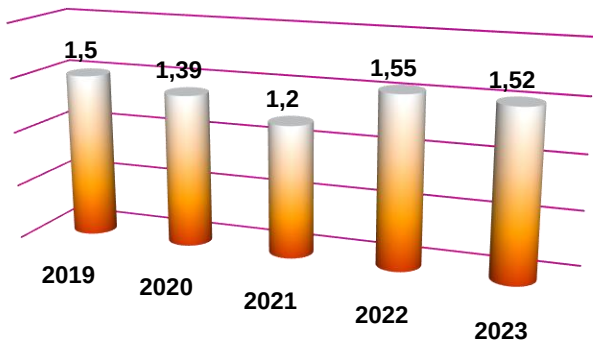
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2023

Grafik 1.2
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk
Di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019 - 2023



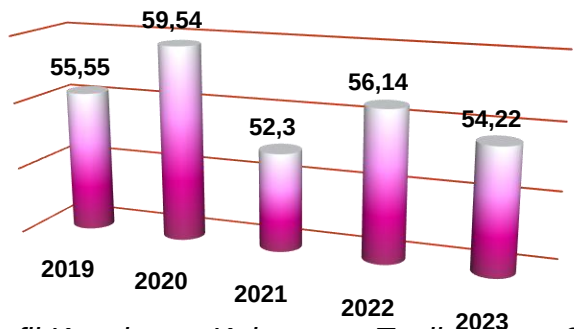
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2023

Grafik 1.3
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk
Di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019 – 2023



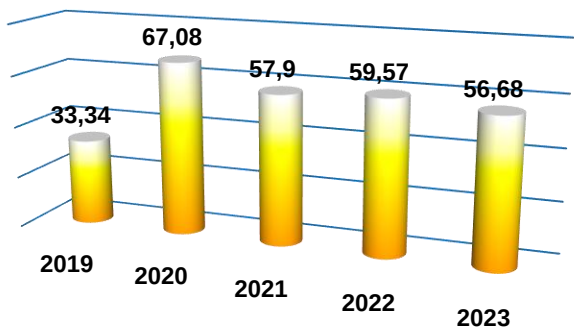
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2023

Grafik 1.4
Rasio Perawat per 100.000 Penduduk
Di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019 - 2023



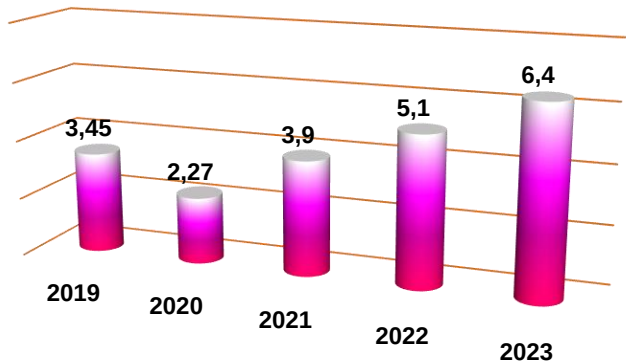
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2023

Grafik 1.5
Rasio Bidan per 100.000 Penduduk
Di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019 – 2023



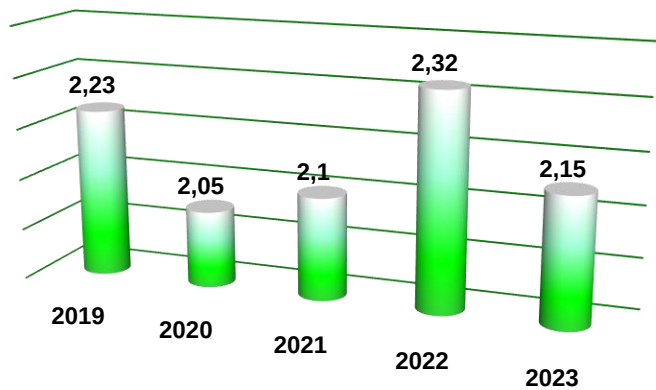
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2023

Grafik 1.6
Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 Penduduk
Di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019 - 2023



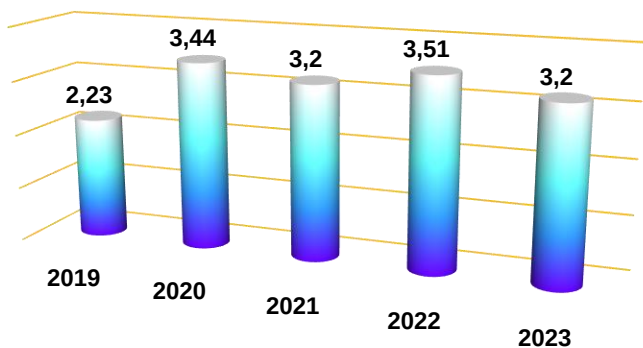
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2023

Grafik 1.7
 Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan per 100.000 Penduduk
 Di Kabupaten Tasikmalaya
 Tahun 2019 – 2023



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2023

Grafik 1.8
 Rasio Tenaga Gizi per 100.000 Penduduk
 Di Kabupaten Tasikmalaya
 Tahun 2019 - 2023



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2023

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan UKBM

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1) Rumah Sakit Umum Daerah

a) RSUD Singaparna Medika Citra Utama

Rumah Sakit Singaparna Medika Citra Utama (SMC), data dasar sebagai berikut :

- Tipe Rumah Sakit : C
- Alamat : Jl. Raya Rancamaya Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya
- Email dan Website : rssmc@tasikmalayakab.go.id
rssmc.tasikmalayakab.go.id

- Telepon : 0265 543237
- Jumlah Tempat Tidur :
 - VIP : 4
 - Kelas 1 : 14
 - Kelas 2 : 18
 - Kelas 3 : 135
 - Perinatologi : 19
 - ICU : 15
 - NICU : 4
 - HCU : 6
 - IBS : 8
 - OK Sentral : 5
 - OK Lt. 2 IGD : 3
 - VK : 10
 - IGD : 49
 - Bayi Sehat : 8
 - Kemoterapi : 5
 - Layanan Dialisis : 20
 - Isolasi : 25

b) Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Tasikmalaya

Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Tasikmalaya, data dasar sebagai berikut :

- Tipe Rumah Sakit : D
- Alamat : Kp.Pakemitan 2 RT/RW.010/007
Desa Pakemitan Kecamatan
Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya
- Email : rsudcikatomas2023@gmail.com
- Jumlah Tempat Tidur :
 - Kelas 1 : 2
 - Kelas 2 : 2
 - Kelas 3 : 36
 - Perinatologi : 6
 - Nifas : 4

2) Rumah Sakit Swasta

Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Tasikmalaya adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Respati, data dasar sebagai berikut :

- Tipe Rumah Sakit : C
- Alamat : Jl. Raya Singaparna Km. 11 Cikunir
Kabupaten Tasikmalaya
- Email dan Website : medikarespati@yahoo.co.id
www.rsiarespati-tsm.co.id
- Telepon : 0265 549337
- Jumlah Tempat Tidur :
 - VIP : 2
 - Kelas 1 : 10
 - Kelas 2 : 3
 - Kelas 3 : 12
 - Ruangn Isolasi : 5
 - Neonatologi : 8
 - Intensive : 5

3) Poliklinik

Jumlah poliklinik per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebanyak 74 Klink, dan yang berstatus aktif 72 Klinik. Rincian per kecamatan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5
Jumlah Poliklinik di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

NO	NAMA KLINIK	JENIS KLINIK	JENIS PELAYANAN	KECAMATAN	STATUS KLINIK
1	Violetta Skincare	Pratama	Non Rawat Inap	Bantarkalong	Aktif
2	Klinik Sahabat Sehat	Pratama	Rawat Inap	Bantarkalong	Aktif
3	Klinik Insan Mandiri	Pratama	Non Rawat Inap	Bantarkalong	Aktif
4	Bahagia Medika Center	Pratama	Non Rawat Inap	Ciawi	Aktif
5	Klinik Nabila	Pratama	Non Rawat Inap	Ciawi	Aktif

6	Smitra Klinik	Pratama	Non Rawat Inap	Ciawi	Aktif
7	Azilfa Medika	Pratama	Non Rawat Inap	Ciawi	Aktif
8	Anton Tomi Clinic	Pratama	Non Rawat Inap	Ciawi	Aktif
9	Klinik Al fayed	Pratama	Non Rawat Inap	Ciawi	Aktif
10	Klinik Fauziyyah Medika	Pratama	Rawat Inap	Cigalontang	Aktif
11	Klinik Candra Medika	Pratama	Rawat Inap	Cigalontang	Aktif
12	Pratama Jaya Medika	Pratama	Non Rawat Inap	Cigalontang	Aktif
13	Klinik Kartini	Pratama	Rawat Inap	Cikalong	Aktif
14	Klinik Mentari	Pratama	Non Rawat Inap	Cikalong	Aktif
15	KLINIK SATIVA	Pratama	Rawat Inap	Cikalong	Aktif
16	Bisma Brata	Pratama	Rawat Inap	Cikatomas	Aktif
17	Pinky Medical Center	Utama	Rawat Inap	Cikatomas	Aktif
18	Klinik ADISA	Pratama	Rawat Inap	Cipatujah	Aktif
19	Klinik Al-Fadillah	Pratama	Non Rawat Inap	Cipatujah	Aktif
20	Klinik H Sayat Medika	Pratama	Rawat Inap	Cipatujah	Aktif
21	Abhinaya Sehat	Pratama	Non Rawat Inap	Cipatujah	Aktif
22	Tiniara Medika	Pratama	Rawat Inap	Cipatujah	Aktif
23	Klinik HS Putra Medika	Pratama	Rawat Inap	Cipatujah	Aktif
24	Kasih Bunda	Pratama	Non Rawat Inap	Cisayong	Tidak Aktif
25	Klinik Kasih Bunda	Pratama	Non Rawat Inap	Cisayong	Aktif
26	Klinik Pratama Grha Sejahtera	Pratama	Non Rawat Inap	Cisayong	Aktif
27	Idrisiyyah Medical Center	Pratama	Rawat Inap	Cisayong	Aktif
28	Klinik kaila medika stamplat	Pratama	Non Rawat Inap	Gunung Tanjung	Aktif
29	Klinik Pratama Muttaqin Medika	Pratama	Rawat Inap	Jamanis	Aktif
30	Klinik Cahaya Herma Medika	Pratama	Rawat Inap	JAMANIS	Aktif
31	Klinik Pamoyanan Medika	Pratama	Non Rawat Inap	Kadipaten	Aktif
32	Klinik Prima Medika	Pratama	Non Rawat Inap	Kadipaten	Aktif
33	Klinik Pratama Bombay Medika	Pratama	Rawat Inap	Karangnunggal	Aktif
34	Klinik Ummi Medika	Pratama	Rawat Inap	Karangnunggal	Aktif
35	Klinik Prima Azzahra Pratama	Pratama	Non Rawat Inap	Karangnunggal	Aktif

36	Klinik Dokter Iman	Pratama	Non Rawat Inap	Mangunreja	Aktif
37	Klinik Pratama Patria Tama Polres Tasikmalaya	Pratama	Non Rawat Inap	Mangunreja	Aktif
38	Klinik H Dedi Suryadi	Pratama	Non Rawat Inap	Manonjaya	Aktif
39	Klinik Pratama Kamulyan	Pratama	Non Rawat Inap	Manonjaya	Aktif
40	Klinik Aafiyah Medika	Pratama	Rawat Inap	Manonjaya	Aktif
41	Klinik Manonjaya Medical Center	Pratama	Rawat Inap	Manonjaya	Aktif
42	Klinik Pratama Muaffa Medika	Pratama	Rawat Inap	Manonjaya	Aktif
43	Klinik Pratama Al Fatih	Pratama	Rawat Inap	Pagerageung	Aktif
44	Klinik Pratama Khairan Medika	Pratama	Rawat Inap	Pagerageung	Aktif
45	Klinik Pratama Djadjuli Mitra Medika	Pratama	Rawat Inap	Pagerageung	Aktif
46	Klinik Insepar	Pratama	Rawat Inap	Parungponteng	Aktif
47	Klinik Fauziyyah Medika	Pratama	Rawat Inap	Cigalontang	Aktif
48	Grha Sejahtera	Pratama	Rawat Inap	Cisayong	Aktif
49	Al-Idrisiyyah Medical Center	Pratama	Rawat Inap	Cisayong	Aktif
50	Klinik Zarra Medika	Pratama	Rawat Inap	Singaparna	Aktif
51	Klinik Pratama At-taqwa	Pratama	Non Rawat Inap	Salawu	Aktif
52	Cipta Sehat Mandiri	Pratama	Non Rawat Inap	Salawu	Aktif
53	Alabi Medika	Pratama	Non Rawat Inap	Salopa	Aktif
54	Klinik Pratama Ridwana	Pratama	Rawat Inap	Sariwangi	Aktif
55	Azilfa Medika	Pratama	Non Rawat Inap	Singaparna	Aktif
56	Klinik Kimia Farma Singaparna	Pratama	Rawat Inap	Singaparna	Tidak Aktif
57	Klinik Kimia Farma Singaparna	Utama	Non Rawat Inap	Singaparna	Aktif
58	Klinik PKU Muhammadiyah Singaparna	Utama	Rawat Inap	Singaparna	Aktif
59	Klinik Gigi Amanah Dental Smile 2	Pratama	Non Rawat Inap	Singaparna	Aktif
60	Klinik Zarra Medika	Pratama	Rawat Inap	Singaparna	Aktif
61	Klinik Pratama Ar-Rahmah	Pratama	Non Rawat Inap	Sukaraja	Aktif

62	Klinik Harsa Prima Pratama	Pratama	Non Rawat Inap	Sukaraja	Aktif
63	Syifa Medika	Pratama	Non Rawat Inap	Sukarame	Aktif
64	Klinik Pratama Berkah Medika	Pratama	Rawat Inap	Sukarame	Aktif
65	Klinik Salsabiluna	Pratama	Rawat Inap	Sukaratu	Aktif
66	Klinik Kaila Medika II	Pratama	Non Rawat Inap	Sukaratu	Aktif
67	KLINIK PRATAMA KAILA MEDIKA II	Pratama	Non Rawat Inap	Singaparna	Aktif
68	Klinik Pratama Rose House	Pratama	Rawat Inap	Sukaresik	Aktif
69	Klinik Ar Rahman	Pratama	Non Rawat Inap	Sukaresik	Aktif
70	Klinik Avionic	Utama	Rawat Inap	Singaparna	Aktif
71	Klinik Arafa	Pratama	Non Rawat Inap	Singaparna	Aktif
72	Klinik Pratama SMK Kes KH Moh Ilyas Ruhiat (Kahamir)	Pratama	Non Rawat Inap	Singaparna	Aktif
73	Klinik Avionic	Pratama	Rawat Inap	Singaparna	Aktif
74	KLINIK UTAMA ARMINA MEDIKA	Utama	Non Rawat Inap	Singaparna	Aktif

4) UPTD Puskesmas

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa yang disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

Jumlah di Kabupaten Tasikmalaya 40 Puskesmas, terdiri atas 19 Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan 21 Puskesmas Non DTP. Secara rinci daftar berikut kemampuan layanannya terurai dalam Tabel 1.6 di bawah ini:

Tabel 1.6
Daftar Unit Pelaksana Teknis Puskesmas
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Puskesmas	Alamat	Kemampuan Layanan		Jml Desa
			DTP/Non	PONED /Non	
1	Cipatujah	Jl. Raya Cipatujah 123, Kec. Cipatujah	DTP	PONED	15
2	Karang Nunggal	Ds. Karangnunggal No. 12, Kec. Karangnunggal	DTP	PONED	14
3	Cikalong	Jl. Raya Cikalong, Ds. Cikalong, Kecamatan Cikalong	DTP	PONED	13
4	Pancatengah	Jl. Raya Pancatengah, Kec. Pancatengah	DTP	PONED	11
5	Cikatomas	Ds. Cikatomas, Kec. Cikatomas	DTP	PONED	9
6	Cibalong	Ds. Cibalong, Kec. Cibalong	Non DTP	Non PONED	6
7	Parungponteng	Ds. Parungponteng, Kec. Parung Ponteng	Non DTP	Non PONED	8
8	Bantarkalong	Ds. Simpang, Kec. Bantar Kalong	DTP	PONED	8
9	Bojongasih	Ds. Bojongasih, Kec. Bojong Asih	Non DTP	PONED	6
10	Culamega	Ds. Culamega, Kec. Culamega	Non DTP	PONED	5
11	Bojonggambir	Jl. Ciawi Pasir Kuning Ds. Bojonggambir, Kec. Bojonggambir	DTP	Non PONED	10
12	Sodonghilir	Ds. Sodonghilir, Kec. Sodonghilir	DTP	PONED	12
13	Taraju	Jl. Raya Taraju Rt 006/01, Kec. Taraju	DTP	PONED	9
14	Salawu	Jl. Raya Salawu 118, Kec. Salawu	Non DTP	PONED	12
15	Puspahiang	Jl. Raya Puspahiang 7, Kec. Puspahiang	Non DTP	PONED	8
16	Tanjungjaya	Jl. Sukaraja-Mangunreja No. 007, Ds. Cibalanarik, Kec. Tanjungjaya	Non DTP	Non PONED	7
17	Sukaraja	Ds. Sukaraja, Kec. Sukaraja	DTP	PONED	8
18	Salopa	Jl. Raya Salopa 226, Kec. Salopa	Non DTP	PONED	9
19	Jatiwaras	Ds. Jatiwaras, Kec. Jatiwaras	Non DTP	PONED	11
20	Cineam	Ds. Cineam, Kec. Cineam	DTP	PONED	10
21	Manonjaya	Jl. Perumahan 6, Kec. Manonjaya	DTP	PONED	12

No	Puskesmas	Alamat	Kemampuan Layanan		Jml Desa
			DTP/Non	PONED /Non	
22	Gunungtanjung	Ds. Gunungtanjung, Kec. Gunungtanjung	Non DTP	PONED	7
23	Tinewati	Jl. Raya Barat Singaparna, Kec. Singaparna	DTP	PONED	2
24	Singaparna	Ds. Singaparna, Kec. Singaparna	Non DTP	Non PONED	8
25	Sukarame	Ds. Sukarame, Kec. Sukarame	DTP	PONED	6
26	Mangunreja	Ds. Mangunreja, Kec. Mangunreja	Non DTP	Non PONED	6
27	Cigalontang	Jln Perkantoran no 38 Ds Jayapura, Kec. Cigalontang	DTP	Non PONED	16
28	Leuwisari	Ds. Leuwisari, Kec. Leuwisari	Non DTP	Non PONED	7
29	Karangjaya	Ds. Sirnajaya, Kec. Karangjaya	Non DTP	Non PONED	4
30	Sariwangi	Ds. Sariwangi, Kec. Sariwangi	Non DTP	PONED	8
31	Cisaruni	Jl. Batu Beulah, ds. Cisaruni Kec. Padakembang	Non DTP	Non PONED	5
32	Sukaratu	Ds. Sukaratu, Kec. Sukaratu	DTP	PONED	8
33	Cisayong	Ds. Cisayong, Kec. Cisayong	Non DTP	PONED	13
34	Sukahening	Ds. Sukahening, Kec. Sukahening	Non DTP	PONED	7
35	Rajapolah	Ds. Rajapolah, Kec. Rajapolah	DTP	PONED	8
36	Jamanis	Ds. Sindangraja, Kec. Jamanis	DTP	Non PONED	8
37	Ciawi	Jl. Puskesmas, Kec. Ciawi	DTP	PONED	11
38	Kadipaten	Jln Raya Perjuangan Ds Pamoyanan Kec. Kadipaten	Non DTP	Non PONED	6
39	Pagerageung	Tanjaknangsi 25, Kec. Pagerageung	Non DTP	PONED	10
40	Sukaresik	Ds. Sukararatu, Kec. Sukaresik	Non DTP	PONED	8

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasal 57 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi pasal 4 yaitu

setiap Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah terakreditasi wajib dilakukan Akreditasi kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun.

Seluruh 40 Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan akreditasi, dengan status akreditasi sebagai berikut :

Tabel 1.7
Status Akreditasi Puskesmas
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Puskesmas	Status Akreditasi
1	Cipatujah	Utama
2	Karangnunggal	Paripurna
3	Cikalong	Utama
4	Pancatengah	Paripurna
5	Cikatomas	Utama
6	Cibalong	Paripurna
7	Parungponteng	Paripurna
8	Bantarkalong	Utama
9	Bojongasih	Paripurna
10	Culamega	Paripurna
11	Bojonggambir	Paripurna
12	Sodonghilir	Paripurna
13	Taraju	Utama
14	Salawu	Paripurna
15	Puspahiang	Paripurna
16	Tanjungjaya	Madya
17	Sukaraja	Utama
18	Salopa	Paripurna
19	Jatiwaras	Paripurna
20	Cineam	Paripurna
21	Karangjaya	Paripurna
22	Manonjaya	Paripurna

No	Puskesmas	Status Akreditasi
23	Gunung Tanjung	Utama
24	Singaparna	Paripurna
25	Tinewati	Paripurna
26	Mangunreja	Paripurna
27	Sukarame	Paripurna
28	Cigalontang	Paripurna
29	Leuwisari	Paripurna
30	Cisaruni	Utama
31	Sariwangi	Paripurna
32	Sukaratu	Paripurna
33	Cisayong	Utama
34	Sukahening	Paripurna
35	Rajapolah	Paripurna
36	Jamanis	Paripurna
37	Ciawi	Paripurna
38	Kadipaten	Paripurna
39	Pagerageung	Madya
40	Sukaresik	Paripurna

Rekapitulasi status akreditasi Puskesmas sebagai berikut:
Paripurna 28 Puskesmas (75%), Utama 10 Puskesmas (25%), dan Madya 2 Puskesmas (5%).

5) Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu sebagai salah satu jaringan pelayanan Puskesmas berfungsi untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Jumlah dan kondisi Puskesmas Pembantu di Kabupaten Tasikmalaya tergambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.8
Jumlah dan Kondisi Puskesmas Pembantu
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Puskesmas	Jumlah Pustu	Kondisi			
			B	RR	RS	RB
1	Bantarkalong	3	1	2		
2	Bojongasih	2		2		
3	Bojonggambir	5		5		
4	Cisayong	4	4			
5	Ciawi	5	5			
6	Cibalong	4	2	2		
7	Cigalontang	8	2	5		1
8	Cikalong	7	6	1		
9	Cikatomas	8	3		2	3
10	Cineam	4	4			
11	Cipatujah	8	4			4
12	Cisaruni	2	2			
13	Culamega	3	3			
14	Gunungtanjung	3	1	1	1	
15	Jamanis	2	2			
16	Jatiwaras	9	7			2
17	Kadipaten	2			2	
18	Karangjaya	3	1	1	1	
19	Karangnunggal	9	7	2		
20	Leuwisari	1			1	
21	Mangunreja	4		3		1
22	Manonjaya	5	4			1
23	Pagerageung	5	2	1	2	
24	Pancatengah	4	4			
25	Parungponteng	4				4
26	Puspahiang	5	1	1	1	2
27	Rajapolah	1	1			
28	Salawu	5	4	1		
29	Salopa	5		2	1	2
30	Sariwangi	2			1	1
31	Singaparna	2	2			
32	Sodonghilir	5	3			2
33	Sukahening	3		3		
34	Sukaraja	4		2		2
35	Sukarame	3	1	1	1	
36	Sukaratu	3	2	1		
37	Sukaresik	3	3			
38	Tanjungjaya	3	1	1		1
39	Taraju	2	1		1	
40	Tinewati	1	1			
	Jumlah	161	84	37	14	26
	%		52,17	22,98	8,70	16,15

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2024

6) Puskesmas Keliling

Puskesmas Keliling adalah salah satu jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 peran Puskesmas Keliling adalah :

- 1. Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas.
- 2. Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit.
- 3. Mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, dll.
- 4. Mendukung pelayanan rujukan.
- 5. Mendukung pelayanan promotif dan preventif.

Jumlah Puskesmas Keliling dan Ambulans Puskesmas pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9
Jumlah Pusling Roda 4 dan Roda 2 serta Ambulans
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Puskesmas	Jumlah Pusling Roda 4	Jumlah Pusling Roda 2	Jumlah Ambulans
1	Cipatujah	0	0	2
2	Karangnunggal	0	0	3
3	Cikalong	0	1	1
4	Pancatengah	0	0	2
5	Cikatomas	0	0	2
6	Cibalong	0	0	2
7	Parungponteng	0	0	1
8	Bantarkalong	0	0	3
9	Bojongasih	0	1	1
10	Culamega	0	1	1
11	Bojonggambir	0	0	2
12	Sodonghilir	1	0	2
13	Taraju	0	0	2
14	Salawu	0	1	1
15	Puspahiang	0	1	2

No	Puskesmas	Jumlah Pusling Roda 4	Jumlah Pusling Roda 2	Jumlah Ambulans
16	Tanjungjaya	0	0	2
17	Sukaraja	0	0	2
18	Salopa	0	0	2
19	Jatiwaras	0	0	2
20	Cineam	0	1	1
21	Manonjaya	1	0	2
22	Gunungtanjung	0	0	2
23	Tinewati	0	0	1
24	Singaparna	0	1	1
25	Sukarame	0	0	2
26	Mangunreja	1	0	1
27	Cigalontang	1	0	1
28	Leuwisari	0	1	1
29	Karangjaya	0	0	1
30	Sariwangi	0	0	2
31	Cisaruni	0	0	1
32	Sukaratu	0	1	1
33	Cisayong	0	1	0
34	Sukahening	0	0	2
35	Rajapolah	1	0	2
36	Jamanis	0	0	2
37	Ciawi	0	0	1
38	Kadipaten	0	0	2
39	Pagerageung	0	1	1
40	Sukaresik	0	0	1
	Jumlah	5	11	63

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2024

7) Praktik Bidan Desa

Bidan desa merupakan salah satu jaringan pelayanan Puskesmas. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, praktik bidan desa merupakan tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan oleh bidan yang ditugaskan di satu desa atau kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas. Penempatan bidan di desa utamanya adalah dalam upaya percepatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, disamping itu juga untuk peningkatan status kesehatan masyarakat. Tugas bidan desa, sesuai kewenangannya, yaitu:

- a) Pelayanan kesehatan ibu,
- b) Pelayanan kesehatan anak,

- c) Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana,
- d) Pelayanan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat.
- e) Pelayanan kesehatan prioritas lainnya.

Dari sebanyak 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya telah ditempatkan sebanyak 397 bidan desa (113%).

b. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

1) Posyandu

Posyandu adalah salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Jumlah Posyandu aktif di Kabupaten Tasikmalaya berikut stratifikasi Posyandu tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10
Jumlah Posyandu dan Stratifikasinya
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Puskesmas	Jumlah Posyandu	Stratifikasi			
			Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
1	Cipatujah	108	0	15	91	2
2	Karangnunggal	93	0	12	60	21
3	Cikalong	89	0	13	63	13
4	Pancatengah	75	3	9	10	53
5	Cikatomas	74	0	2	40	32
6	Cibalong	44	0	28	16	0
7	Parungponteng	48	4	38	5	1
8	Bantarkalong	55	0	3	46	6
9	Bojongasih	31	0	27	4	0
10	Culamega	43	0	23	12	8

No	Puskesmas	Jumlah Posyandu	Stratifikasi			
			Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
11	Bojonggambir	66	63	3	0	0
12	Sodonghilir	84	0	39	45	0
13	Taraju	53	10	37	4	2
14	Salawu	68	0	0	55	13
15	Puspahiang	45	0	10	22	13
16	Tanjungjaya	55	0	28	27	0
17	Sukaraja	61	0	46	15	0
18	Salopa	80	4	28	39	9
19	Jatiwaras	55	0	3	42	10
20	Cineam	54	5	37	12	0
21	Manonjaya	76	0	2	9	65
22	Gunungtanjung	49	0	0	22	27
23	Tinewati	40	0	4	10	26
24	Singaparna	56	4	0	46	6
25	Sukarame	46	0	34	12	0
26	Mangunreja	64	0	8	16	40
27	Cigalontang	80	0	15	33	32
28	Leuwisari	47	0	11	26	10
29	Karangjaya	25	8	1	1	15
30	Sariwangi	37	0	15	18	4
31	Cisaruni	44	28	8	3	5
32	Sukaratu	65	0	16	25	24
33	Cisayong	82	0	0	12	70
34	Sukahening	40	0	17	18	5
35	Rajapolah	78	0	18	25	35
36	Jamanis	60	0	0	55	5
37	Ciawi	86	0	18	54	14
38	Kadipaten	40	0	0	5	35
39	Pagerageung	65	0	40	20	5
40	Sukaresik	34	0	17	11	6
	Jumlah	2.395	129	625	1.029	612
	%		5,39	26,10	42,96	25,55

2) Polindes

Pondok Bersalin Desa (Polindes) merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam penyediaan tempat persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta KB yang berlokasi di desa. Dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah bidan desa 380 orang, jumlah Polindes baru ada 109 buah (31%). Berdasarkan Data Dasar Puskesmas tahun 2024, jumlah Polindes per Puskesmas secara terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.11
Jumlah Polindes di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

No	Puskesmas	Jumlah Desa	Jumlah Bidan Desa	Jumlah Polindes
1	Cipatujah	15	15	3
2	Karangnunggal	14	14	0
3	Cikalong	13	13	3
4	Pancatengah	11	16	4
5	Cikatomas	9	12	2
6	Cibalong	6	8	0
7	Parungponteng	8	8	1
8	Bantarkalong	8	10	2
9	Bojongasih	6	6	2
10	Culamega	5	9	2
11	Bojonggambir	10	10	2
12	Sodonghilir	12	12	1
13	Taraju	9	9	3
14	Salawu	12	12	2
15	Puspahiang	8	10	2
16	Tanjungjaya	7	10	1
17	Sukaraja	8	13	8
18	Salopa	9	10	4
19	Jatiwaras	11	17	5
20	Cineam	10	10	8
21	Manonjaya	12	16	3
22	Gunungtanjung	7	7	2
23	Tinewati	2	6	0
24	Singaparna	8	8	1
25	Sukarame	6	6	1
26	Mangunreja	6	9	3
27	Cigalontang	16	15	4

No	Puskesmas	Jumlah Desa	Jumlah Bidan Desa	Jumlah Polindes
28	Leuwisari	7	8	2
29	Karangjaya	4	4	3
30	Sariwangi	8	9	1
31	Cisaruni	5	6	2
32	Sukaratu	8	8	1
33	Cisayong	13	13	7
34	Sukahening	7	6	0
35	Rajapolah	8	8	0
36	Jamanis	8	8	1
37	Ciawi	11	11	5
38	Kadipaten	6	6	3
39	Pagerageung	10	11	2
40	Sukaresik	8	8	0
	Jumlah	351	397	96
	%		113	27,4

3. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.12
Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Dinas Kesehatan	Nilai (Rp)
	ASET TETAP	
1	Tanah	25.112.439.290,00
2	Peralatan dan Mesin	383.254.374.245,29
3	Gedung dan Bangunan	310.858.930.164,8
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.939.995.061,00
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	1.821.858.170,00
7	Akumulasi Penyusutan	(323.365.031.173,83)
	Jumlah	415.622.565.757,26
8	Ekstra Kompatabel	18.575.870.826,34
	Aset Lainnya	
8	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-
9	Aset Tidak Berwujud	2.121.841.750,00
10	Aset Lain-Lain	25.446.899.462,00
	Jumlah	27.568.741.212

Sumber : Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

D. Isu Strategis

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan kesehatan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya analisis terhadap isu strategis merupakan proses pengayaan analisis lingkungan eksternal yang sangat menentukan dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan jangka panjang suatu daerah. Dengan identifikasi atas dinamika eksternal yang tepat, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menyelaraskan diri dalam menghadapi permasalahan, potensi kegagalan, dan peluang dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Dalam penerapan rencana strategis, seringkali timbul “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan kesehatan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD). Adanya gap tersebut juga dikarenakan oleh adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan kesehatan agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan kesehatan diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kesehatan pada periode sebelumnya.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan berbagai perkembangan dari tahun ke tahun. Dalam pencapaian keberhasilan pembangunan ini, tidak terlepas dari berbagai permasalahan di berbagai bidang kesehatan. Permasalahan ini merupakan tantangan yang harus dikendalikan, diminimalkan dan diselesaikan, demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap segala kendala dan hambatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diperoleh rumusan permasalahan yang kemudian dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.13
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tercapainya angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Masih tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular dan menular serta kematian ibu dan bayi	Masih tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular dan menular
			Masih adanya kematian ibu dan bayi
2	Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi serta masih adanya Balita Kurang Gizi.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada Ibu dan Bayi	Belum optimalnya tatakelola Antenatal Care (ANC) yang berkualitas dan terpadu.
			Kesadaran ibu hamil masih kurang terkait pemeriksaan kehamilannya
			Pelaksanaan kelas ibu hamil belum optimal

			Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku memberikan ASI eksklusif dan pemberian MP ASI
			Asupan makanan pada ibu hamil dan bayi yang kurang bergizi.
			Manajemen sistem rujukan dan kegawatdaruratan pelayanan kesehatan ibu melahirkan masih kurang optimal.
		Masih rendahnya gizi masyarakat dan masih terdapatnya balita gizi buruk dan stunting.	Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku memberikan asupan gizi pada Balita
			Status sosial ekonomi keluarga balita gizi buruk dan stunting.
			Cakupan pemantauan tumbuh kembang balita (Kartu Menuju Sehat) belum optimal
3	Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pertambahan jumlah penduduk dikabupaten tasikmalaya tidak sebanding dengan bertambahnya fasilitas pelayanan Kesehatan dan tenaga Kesehatan	Kurangnya SDM (Tenaga Kesehatan) sesuai dengan proporsi jumlah penduduk
			Kurangnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sesuai dengan proporsi jumlah penduduk
4	Rasio Fasyankes (Puskesmas dan Rumah Sakit)	Kurangnya sarana Puskesmas dan Rumah Sakit	Belum tercapainya jumlah sarana Puskesmas 1 : 30.000
			Belum tercapainya jumlah sarana Rumah Sakit 1 : 100.000

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan LKIP ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai kedudukan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, aspek kepegawaian dan sarana prasarana, isu aktual, sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran.

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya untuk masa waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, RTRW Kabupaten Tasikmalaya dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Selain itu, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan setiap tahunnya hingga perencanaan tahun 2026. Program dan kegiatan tahun berkenaan dalam Renstra Dinas Kesehatan diuraikan dalam Renja Dinas Kesehatan.

1. Maksud, Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

a. Maksud

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya diharapkan akan dapat memberikan kejelasan arah dan sasaran Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya mendukung Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026.

Selain itu Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dimaksudkan untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pembangunan Sektor Kesehatan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan secara periodik selama kurun waktu 5 tahun.

Adapun Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu :

b. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021 – 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- 2) Menyusun strategi dan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Kesehatan berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-1 dalam RPJMD yaitu :

Misi ke-1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah

Misi ke-1 mempunyai 1 tujuan, yaitu:

T.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan sasaran sebagai berikut:

S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Sasaran :

- Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,53	69,73	69,99	70.25	70.51	70.77
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	50,1	50,3	50,5	50,7	50,8

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

B. Rencana Kinerja (Renja)

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya. Renja Dinas Kesehatan mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Dinas Kesehatan adalah

perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yaitu SKPD, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1. Maksud, Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional :

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2024.
- 2) Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan laporan kinerja.

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk lebih jelasnya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagaimana berikut.

Tabel 2.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas
		1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
		1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
		1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

		1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

		1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
		1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

		1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
		1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
		1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan

	Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas SektorTingkat daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu
		1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
		1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perjanjian Kinerja (Jankin) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 secara terinci dapat dilihat dalam dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	70.25	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50,5	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	407.997.920.414,00	DAU, BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	213.819.769.172,00	DAU, DAK, DBH
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.792.660.900,00	DAU, DAK
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	503.831.000,00	DAU, DAK
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.420.093.000,00	DAU, DAK

D. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pagu anggaran Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Pagu Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

Kode Rekening	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			407.997.920.414,00
01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		160.000.000,00
01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00
01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00
01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		153.947.698.046,00
01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	153.947.698.046,00
01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.940.583.692,00
01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.469.961.692,00
01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00
01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00
01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00
01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.622.000,00
01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7.240.837.362,00
01.2.07.05			Pengadaan Mebel	8.050.000,00
01.2.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.232.787.362,00
01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.050.206.000,00

01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	828.006.000,00
01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.222.200.000,00
01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		387.231.200,00
01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.200.000,00
01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.750.000,00
01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.281.200,00
01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00
01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		242.271.364.114,00
01.2.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	242.271.364.114,00
02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			213.819.769.172,00
02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		52.614.436.799,00
02.2.01.02			Pembangunan Puskesmas	1.096.350.000,00
02.2.01.08			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	450.000.000,00
02.2.01.09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.797.317.400,00
02.2.01.10			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.512.336.000,00
02.2.01.11			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.415.868.000,00
02.2.01.14			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	30.632.981.950,00

			Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
02.2.01.20			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	73.931.000,00
02.2.01.22			Pengembangan Rumah Sakit	5.113.304.000,00
02.2.01.23			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.398.891.449,00
02.2.01.26			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	123.457.000,00
02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		161.069.232.373,00
02.2.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.020.135.000,00
02.2.02.02			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.218.170.000,00
02.2.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	496.840.000,00
02.2.02.04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.050.000.000,00
02.2.02.05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.034.880.000,00
02.2.02.06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	731.366.000,00
02.2.02.07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.030.000.000,00
02.2.02.08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000,00
02.2.02.09			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.612.880.000,00
02.2.02.10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000,00

02.2.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.630.314.000,00
02.2.02.12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	350.115.000,00
02.2.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	131.770.000,00
02.2.02.15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.909.375.000,00
02.2.02.17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.476.310.000,00
02.2.02.18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	265.379.000,00
02.2.02.20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.361.920.000,00
02.2.02.22			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	120.471.100,00
02.2.02.25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14.666.812.000,00
02.2.02.26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	90.446.486.837,00
02.2.02.27			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	30.000.000,00
02.2.02.28			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12.500.000,00
02.2.02.29			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	200.000.000,00
02.2.02.32			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.405.760.239,00
02.2.02.33			Operasional Pelayanan Puskesmas	8.759.199.000,00
02.2.02.34			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	818.544.197,00
02.2.02.35			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	163.900.000,00
02.2.02.36			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	357.920.000,00
02.2.02.38			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	3.800.000.000,00

			Darurat Terpadu (SPGDT)	
02.2.02.40			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	364.540.000,00
02.2.02.41			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	162.260.000,00
02.2.02.42			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	199.760.000,00
02.2.02.44			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	527.005.000,00
02.2.02.46			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.614.620.000,00
02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		50.000.000,00
02.2.03.02			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000,00
02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		86.100.000,00
02.2.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	86.100.000,00
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			2.792.660.900,00
03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		242.655.000,00
03.2.02.03			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	242.655.000,00
03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.550.005.900,00
03.2.03.01			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.550.005.900,00
04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			503.831.000,00

04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		86.730.000,00
04.2.01.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.730.000,00
04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		235.062.000,00
04.2.03.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	235.062.000,00
04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		182.039.000,00
04.2.06.01			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	182.039.000,00
05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			3.420.093.000,00
05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		228.100.000,00
05.2.01.01			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,	228.100.000,00

			Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		600.000.000,00
05.2.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	600.000.000,00
05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.591.993.000,00
05.2.03.01			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.591.993.000,00
Jumlah				628.534.274.486

Alokasi sasaran strategis digunakan untuk membiayai 5 program yang ada di Dinas Kesehatan yaitu

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Sekretariat Dinas Kesehatan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam target kinerja bidang kesehatan yang merupakan urusan wajib Dinas Kesehatan, terdapat beberapa indikator kinerja urusan pilihan yaitu urusan yang secara nyata ada di daerah dan sesuai dengan tupoksi dan merupakan indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dalam mengemban tugas pokok dan fungsi merujuk kepada pencapaian 55 indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun Berjalan

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana table berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70.25	74.06	105,42	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	50,5	77.17	152,81	Sangat Baik

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi dalam 2 indikator dan seluruh capaian berkriteria Sangat Baik dengan kode hijau tua. Pada tahun 2024 terdapat 9 indikator kinerja program yang diukur capaiannya dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Program Tahun 2024

Program	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kriteria
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mecapai 100% (12 standar pelayanan)	%	66.7	95.02	142,46	Sangat Baik
	Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1:30.000)	1/0000	1/6382	1/7309	82,86	Tinggi
	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	%	4.11	1,5	36,50	Sangat Rendah
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	14	9.2	152,17	Sangat Baik
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Presentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	%	100	100	100,00	Sangat Baik

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Skor	0.14	0,16	114,29	Sangat Baik
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat	%	55	74.35	135,18	Sangat Baik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	BB	78,8	79.45	100,82	Sangat Baik
	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	90	90.44	100,49	Sangat Baik

Dari tabel 3.3 di atas, terdapat 5 (lima) program yang terbagi dalam 9 (sembilan) indikator. Pada tahun 2024, 6 (enam) indikator program sudah sangat baik 1 (satu) program kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi yaitu indikator Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk dan 1 (satu) program kriteria penilaian realisasi kinerja sangat rendah yaitu indikator Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk dengan capaian 1,5 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk dari target 4.11.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan dengan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Perbandingan antara capaian realisasi kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,67	69,95	73,87	74.06
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	51.05	51.68	69.19	77.17

Tabel 3.4 membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan Tahun 2023, 2022 dan 2021 seluruh indikator

capaian kinerja sasaran naik. Perbandingan antara capaian realisasi kinerja program tahun 2024 dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Program Tahun 2024
dengan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Program	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	%	86.45	87.63	90.08	95.02
	Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1:30.000)	1/0000	1/7.709	1/7.709	1/7.649	1/7309
	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	%	1.05	1.05	1.05	1,5
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	14.7	14.22	10.72	9,2
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Presentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	%	100	100	100	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Skor	0.125	0.125	0.083	0.16
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat	%	12.85	48.71	71.80	74.35
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	BB	71.18	70.17	75.8	79.45
	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	69.67	89.80	89.86	90.44

Tabel 3.5 membandingkan antara realisasi capaian kinerja program tahun 2024 dengan Tahun 2023, 2022 dan 2021 seluruhnya indikator capaian kinerja program naik.

3. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Terakhir Rencana Strategis**

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan target terakhir rencana strategis sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sasaran
Dengan Target Terakhir Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Terakhir Rencana Strategis	Realisasi	GAP
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70.77	74.06	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	50,8	77.17	-

Tabel 3.6 membandingkan antara realisasi kinerja sasaran Tahun 2024 dengan target terakhir rencana strategis seluruh indikator sudah mencapai target. Perbandingan antara capaian realisasi kinerja program dengan target terakhir rencana strategis sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Program
Dengan Target Terakhir Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten TasikmalayaTahun 2024

Program	Indikator	Satuan	Target Terakhir Rencana Strategis	Realisasi 2024	GAP
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mecapai 100% (12 standar pelayanan)	%	100	95.02	5.93

	Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1:30.000)	1/0000	1/6601	1/7309	1/708
	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	%	6,11	1,5	4,61
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	12	9,2	-
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Presentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	%	100	100	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Skor	0,15	0.16	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat	%	75	74.35	0.65
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	BB	80,50	79.45	1.05
	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	100	90.44	9.56

Tabel 3.7 membandingkan antara realisasi kinerja program tahun 2024 dengan target terakhir rencana strategis dari 9 (sembilan) indikator kinerja program terdapat 3 (tiga) indikator yang sudah mencapai target yaitu indikator Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, presentase cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar dan rasio tenaga medis per satuan penduduk.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran tahun 2024 dengan standar nasional sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sasaran
Dengan Standar Nasional
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Standar Nasional Tahun 2024	Realisasi	GAP
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,39	74.06	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	N/A	77.17	-

Tabel 3.8 membandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan standar nasional terdapat indikator angka usia harapan hidup telah mencapai standar nasional. Perbandingan antara capaian realisasi kinerja program dengan standar nasional sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Program
Dengan Standar Nasional
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Program	Indikator	Satuan	Target Standar Nasional Tahun 2024	Realisasi 2024	GAP
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	%	100	95.02	5.93
	Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1:30.000)	1/0000	N/A	1/7309	-
	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	%	1/100.000	1/657.803	1/557.803
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	14	9,2	-

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Presentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	%	100	100	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Skor	45 Per 100.000 Penduduk	0.16 / 16 Per 100.000 Penduduk	29
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat	%	90	74.35	15,65
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	BB	N/A	79.45	-
	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	83	90.44	9.56

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

- a. Penyebab Keberhasilan
- Adanya komitmen dari semua pejabat struktural, fungsional serta seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
 - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
 - Terdapat SDM 2 Tenaga Kesehatan (Bidan) ditugaskan pada satu Desa sehingga cakupan pelayanan pemeriksaan ibu hamil (*antenatal care*) dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten.
 - Adanya upaya deteksi dini pada pelayanan selama kehamilan dengan penerapan pemeriksaan USG pada K1 dan K6 oleh dokter Puskesmas
 - Melaksanakan pendampingan dan OJT pemeriksaan USG bagi ibu hamil oleh Spesialis Obgyn yang dilaksanakan untuk dokter umum Puskesmas.
 - Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap, sebagian besar seluruh puskesmas dan posyandu sudah memiliki antropometri kit terstandar.
 - Adanya pelaporan rutin puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan.

b. Penyebab Kegagalan

- 1) Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk belum mencapai target, Rasio Rumah Sakit seharusnya 1.100.000 Penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya 1.973.411 Jiwa sehingga dibutuhkan 19 Rumah Sakit dan baru terdapat 3 Rumah Sakit di Kabupaten Tasikmalaya hal ini dikarenakan tingginya ketergantungan daerah terhadap Dana Transfer Pusat, kurangnya minat swasta dalam mendirikan rumah sakit di Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Penentuan target SPM belum didasarkan pada data yang akurat, kurangnya tenaga kesehatan terlatih, sarana prasarana kurang memadai, kurangnya koordinasi antar lintas program.

c. Peningkatan Kinerja

- 1) Kerjasama atau kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari internal maupun pihak-pihak dari luar sebagai pemangku kepentingan (Stakeholders).
- 2) Adanya dukungan pembiayaan dari pusat melalui DAK Non Fisik untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan nasional.

d. Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

- 1) Menganggarkan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan kesehatan.
- 2) Melaksanakan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu secara berkala.
- 4) Penetapan target khususnya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan.

e. Perbaikan Kinerja Kedepan

- 1) Meningkatkan komitmen pejabat struktural, fungsional serta seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dalam pencapaian kinerja.

- 2) Optimalisasi pelayanan secara komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif pada seluruh UPTD dan Rumah Sakit di Kabupaten Tasikmalaya.
- 3) Peningkatan integrasi layanan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif antara Fasilitas Kesehatan Pertama dengan Fasilitas Kesehatan Lanjutan.
- 4) Melaksanakan peningkatan kerjasama dengan instansi/ lembaga/stakeholder terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Capaian indikator kegiatan dan efisensi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

No	Kegiatan / Indikator Kegiatan	Capaian Indikator Kegiatan (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		160.000.000,00	149.550.100,00	10.449.900,00	93,47	6,53
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		153.947.698.046,00	153.235.226.597,00	712.471.449,00	99,54	0,46
	Persentase laporan pertanggungja waban keuangan yang sesuai aturan	100					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.940.583.692,00	1.846.024.827,00	94.558.865,00	95,13	4,87
	Cakupan pelayanan administrasi umum	100					

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7.240.837.362,00	7.177.386.500,00	63.450.862,00	99,12	0,88
	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100					
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.050.206.000,00	1.647.046.455,00	403.159.545,00	80,34	19,66
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100					
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		387.231.200,00	386.272.355,00	958.845,00	99,75	0,25
	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100					
7	Peningkatan Pelayanan BLUD		242.271.364.114,00	230.936.961.701,49	11.334.402.412,51	95,32	4,68
	Persentase rumah sakit daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangann ya sebagai BLUD	100					
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangann ya sebagai BLUD	100					
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		52.614.436.799,00	49.368.397.924,00	3.246.038.875,00	93,83	6,17

	Prosentase Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi sesuai standar Nasional	66,67%					
	Prosentase Pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar	100%					
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		161.069.232.373,00	156.626.642.188,00	4.442.590.185,00	97,24	2,76
	Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	95,02%					
	Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulang an penyakit menular dan tidak menular	100%					
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		50.000.000,00	45.310.000,00	4.690.000,00	90,62	9,38
	Jumlah fitur/layanan pada aplikasi website kesehatan	100					
11	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		86.100.000,00	85.175.000,00	925.000,00	98,93	1,07
	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100					

	Persentase Fasyankes Pemerintah dan Non Pemerintah Yang Dilakukan Pembinaan Tata Kelola dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	100					
	Persentase Fasyankes Pemerintah dan Non Pemerintah yang bekerjasama dalam jejaring rujukan	100					
12	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	71,98	242.655.000,00	174.675.000,00	67.980.000,00	71,98	28,02
	Jumlah 9 jenis ketenagaan sesuai dengan standar di fasilitas pelayanan kesehatan	65,71					
13	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64,99	2.550.005.900,00	1.657.176.500,00	892.829.400,00	64,99	35,01
	Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	100					
14	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	99,75	86.730.000,00	86.515.000,00	215.000,00	99,75	0,25

	Jumlah Sarana Kefamasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan	100					
15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	235.062.000,00	235.062.000,00	0,00	100,00	0,00
	Persentase Industri Pangan Skala Rumah Tangga terdaftar yang mengikuti pelatihan Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)	100					
16	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	99,21	182.039.000,00	180.609.300,00	1.429.700,00	99,21	0,79
	Persentase industri rumah tangga terdaftar yang diperiksa Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman	100					

17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76,58	228.100.000,00	174.680.000,00	53.420.000,00	76,58	23,42
	Jumlah unsur masyarakat yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat	100					
	Jumlah dokumen pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif	100					
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,9	600.000.000,00	599.400.000,00	600.000,00	99,90	0,10
	Jumlah dokumen pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif	100					
19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98,22	2.591.993.000,00	2.545.894.162,00	46.098.838,00	98,22	1,78
	Jumlah UKBM yang mengikuti Bintek dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	100					
Jumlah			628.534.274.486,00	607.158.005.609,49	21.376.268.876,51	96,60	3,40

Berdasarkan tabel diatas pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 19 kegiatan, terdapat 15 kegiatan yang capaian kinerjanya sudah melebihi target dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 6,53%.
2. Indikator Sasaran Kegiatan “Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0,46%.
3. Indikator Sasaran Kegiatan “Cakupan pelayanan administrasi umum” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 4,87%.
4. Indikator Sasaran Kegiatan “Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0,88%.
5. Indikator Sasaran Kegiatan “Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 19,66%.
6. Indikator Sasaran Kegiatan “Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0,25%.
7. Indikator Sasaran Kegiatan “Persentase rumah sakit daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD” dan “Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD” pada Peningkatan Pelayanan BLUD tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 4,68%.
8. Indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah fitur/layanan pada aplikasi website kesehatan” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 9,38%.
9. Indikator Sasaran Kegiatan “Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya”, “Persentase Fasyankes Pemerintah dan Non Pemerintah Yang Dilakukan Pembinaan Tata Kelola dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan” dan “Persentase Fasyankes Pemerintah dan Non Pemerintah yang bekerjasama dalam jejaring rujukan” pada kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 1,07%.

10. Indikator Sasaran Kegiatan “Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 35,01%.
11. Indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Sarana Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0,25%.
12. Indikator Sasaran Kegiatan “Persentase industri rumah tangga terdaftar yang diperiksa Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0,79%.
13. Indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah unsur masyarakat yang dilibatkan dalam pemberdayaan Masyarakat: dan “Jumlah dokumen pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 23,42%.
14. Indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah dokumen pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0,10%.
15. Indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah UKBM yang mengikuti BinteK dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 1,78%.

Selama tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Pelaksanaan pada perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, organisasi, serta analisis kegiatan pada tahun sebelumnya;
- b. Pelaksanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dioptimalkan pada saat jam kerja;
- c. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan;

- d. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin dan yang benar-benar perlu pemeliharaan/penggantian suku cadang;
- f. Pembelanjaan sesuai harga penawaran terbaik sehingga sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan yang lain.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian indikator kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Kegiatan / Indikator Kegiatan	Capaian (%)	Target		Capaian		Selisih (Rp)	Persentase (%)
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			160.000.000,00		149.550.100,00	10.449.900,00	93,47
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	12		12			100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			153.947.698.046,00		153.235.226.597,00	712.471.449,00	99,54
	Persentase laporan pertanggungja waban keuangan yang sesuai aturan	100	100		100			100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.940.583.692,00		1.846.024.827,00	94.558.865,00	95,13
	Cakupan pelayanan administrasi umum	100	1		1			100,00

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.240.837.362,00		7.177.386.500,00	63.450.862,00	99,12
	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100	100		100			100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.050.206.000,00		1.647.046.455,00	403.159.545,00	80,34
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100		100			100,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			387.231.200,00		386.272.355,00	958.845,00	99,75
	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100		100			100,00
7	Peningkatan Pelayanan BLUD			242.271.364.114,00		230.936.961.701,49	11.334.402.412,51	95,32
	Persentase rumah sakit daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangann ya sebagai BLUD	100	100		100			100,00
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangann ya sebagai BLUD	100	100		100			100,00
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			52.614.436.799,00		49.368.397.924,00	3.246.038.875,00	93,83
	Prosentase Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi sesuai standar Nasional	66,67%	100		66,67			66,67

	Prosentase Pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar	100%	100		100			100,00
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			161.069.232.373,00		156.626.642.188,00	4.442.590.185,00	97,24
	Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	95,02%	100		95,02			95,02
	Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulang an penyakit menular dan tidak menular	100%	100		100			100,00
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			50.000.000,00		45.310.000,00	4.690.000,00	90,62
	Jumlah fitur/layanan pada aplikasi website kesehatan	100	25		25			100,00
11	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			86.100.000,00		85.175.000,00	925.000,00	98,93
	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100	100		100			100,00
	Persentase Fasyankes Pemerintah dan Non Pemerintah Yang Dilakukan Pembinaan Tata Kelola dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	100	100		100			100,00

	Persentase Fasyankes Pemerintah dan Non Pemerintah yang bekerjasama dalam jejaring rujukan	100	100		100			100,00
12	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	71,98		242.655.000,00		174.675.000,00	67.980.000,00	71,98
	Jumlah 9 jenis ketenagaan sesuai dengan standar di fasilitas pelayanan kesehatan	65,71	35		23			65,71
13	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64,99		2.550.005.900,00		1.657.176.500,00	892.829.400,00	64,99
	Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	100	100		100			100,00
14	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	99,75		86.730.000,00		86.515.000,00	215.000,00	99,75
	Jumlah Sarana Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan	100	16		16			100,00

15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100		235.062.000,00		235.062.000,00	0,00	100,00
	Persentase Industri Pangan Skala Rumah Tangga terdaftar yang mengikuti pelatihan Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)	100	100		100			100,00
16	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	99,21		182.039.000,00		180.609.300,00	1.429.700,00	99,21
	Persentase industri rumah tangga terdaftar yang diperiksa Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman	100	100		100			
17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76,58		228.100.000,00		174.680.000,00	53.420.000,00	76,58
	Jumlah unsur masyarakat yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat	100	3		3			100,00
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,9		600.000.000,00		599.400.000,00	600.000,00	99,90
	Jumlah dokumen pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif	100	1		1			100,00

19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98,22		2.591.993.000,00		2.545.894.162,00	46.098.838,00	98,22
	Jumlah UKBM yang mengikuti Bintek dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	100	3		3			100,00
Jumlah				628.534.274.486,00		607.158.005.609,49	21.376.268.876,51	96,60

Kegiatan dan indikator kegiatan serta target dan realisasi keuangan dalam pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana pada tabel 3.11, dari 19 (sembilan belas) kegiatan terdapat 24 (dua puluh empat) indikator kegiatan, 21 (dua puluh satu) indikator kegiatan sudah mencapai target yang ditetapkan dan terdapat 3 (tiga) indikator kegiatan yang belum mencapai target diantaranya yaitu indikator prosentase fasilitas kesehatan puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi sesuai standar nasional yaitu mencapai 66,67% hal ini dikarenakan terdapat Rumah Sakit yang baru mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2024 (RS Tani Nelayan Tasikmalaya) yang mana nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan belum terbit sehingga belum dapat dilakukan akreditasi, indikator persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mnecapai 95,02% hal ini dikarenakan dalam penentuan target SPM menggunakan target sesuai Keputusan Menteri Kesehatan sehingga target tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan faktual lapangan, serta pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum optimal dan indikator Jumlah 9 jenis ketenagaan sesuai dengan standar di fasilitas pelayanan kesehatan dikarenakan masih terdapat Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum memiliki dokter gigi dari 40 Puskesmas baru 23 Puskesmas tersedia dokter gigi.

B. Realisasi Anggaran

Urusan wajib kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.12
Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

Kode Rekening	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		407.997.920.414,00	395.378.468.535,49	96,91
01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000,00	149.550.100,00	93,47
01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	93.520.900,00	93,52
01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	56.029.200,00	93,38
01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	153.947.698.046,00	153.235.226.597,00	99,54
01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	153.947.698.046,00	153.235.226.597,00	99,54
01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.940.583.692,00	1.846.024.827,00	95,13
01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.469.961.692,00	1.430.475.250,00	97,31
01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	46.535.000,00	93,07
01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	39.880.000,00	99,70
01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.622.000,00	299.134.577,00	85,32
01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.240.837.362,00	7.177.386.500,00	99,12
01.2.07.05		Pengadaan Mebel	8.050.000,00	5.500.000,00	68,32
01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.232.787.362,00	7.171.886.500,00	99,16
01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.050.206.000,00	1.647.046.455,00	80,34

01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	828.006.000,00	424.846.455,00	51,31
01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.222.200.000,00	1.222.200.000,00	100,00
01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.231.200,00	386.272.355,00	99,75
01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.200.000,00	113.024.755,00	99,85
01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.750.000,00	123.331.250,00	99,66
01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.281.200,00	119.980.900,00	99,75
01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.935.450,00	99,78
01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	242.271.364.114,00	230.936.961.701,49	95,32
01.2.10.01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	242.271.364.114,00	230.936.961.701,49	95,32
02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	213.819.769.172,00	206.125.525.112,00	96,40
02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	52.614.436.799,00	49.368.397.924,00	93,83
02.2.01.02		Pembangunan Puskesmas	1.096.350.000,00	1.090.736.600,00	99,49
02.2.01.08		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	450.000.000,00	410.456.417,00	91,21
02.2.01.09		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.797.317.400,00	3.756.539.820,00	98,93
02.2.01.10		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.512.336.000,00	3.426.261.755,00	97,55
02.2.01.11		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.415.868.000,00	1.386.781.518,00	97,95
02.2.01.14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.632.981.950,00	29.102.467.046,00	95,00
02.2.01.20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	73.931.000,00	69.426.000,00	93,91
02.2.01.22		Pengembangan Rumah Sakit	5.113.304.000,00	5.020.089.550,00	98,18
02.2.01.23		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.398.891.449,00	4.982.182.218,00	77,86
02.2.01.26		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	123.457.000,00	123.457.000,00	100,00
02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.069.232.373,00	156.626.642.188,00	97,24

02.2.02.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.020.135.000,00	1.975.344.500,00	97,78
02.2.02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.218.170.000,00	1.087.321.000,00	89,26
02.2.02.03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	496.840.000,00	475.457.400,00	95,70
02.2.02.04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.050.000.000,00	2.046.275.000,00	99,82
02.2.02.05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.034.880.000,00	1.985.501.000,00	97,57
02.2.02.06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	731.366.000,00	623.265.000,00	85,22
02.2.02.07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.030.000.000,00	2.895.000.000,00	95,54
02.2.02.08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000,00	46.650.000,00	93,30
02.2.02.09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.612.880.000,00	1.606.440.000,00	99,60
02.2.02.10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000,00	47.123.000,00	94,25
02.2.02.11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.630.314.000,00	3.595.617.700,00	99,04
02.2.02.12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	350.115.000,00	327.370.000,00	93,50
02.2.02.13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	131.770.000,00	106.536.000,00	80,85
02.2.02.15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.909.375.000,00	11.532.362.850,00	96,83
02.2.02.17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.476.310.000,00	2.451.235.000,00	98,99
02.2.02.18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	265.379.000,00	243.946.615,00	91,92
02.2.02.20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.361.920.000,00	2.252.719.000,00	95,38
02.2.02.22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	120.471.100,00	103.058.500,00	85,55
02.2.02.25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14.666.812.000,00	13.345.609.299,00	90,99
02.2.02.26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	90.446.486.837,00	90.416.004.476,00	99,97
02.2.02.27		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	30.000.000,00	14.000.000,00	46,67
02.2.02.28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12.500.000,00	4.650.000,00	37,20
02.2.02.29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	200.000.000,00	173.660.000,00	86,83
02.2.02.32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.405.760.239,00	2.199.198.469,00	91,41
02.2.02.33		Operasional Pelayanan Puskesmas	8.759.199.000,00	7.321.444.915,00	83,59
02.2.02.34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	818.544.197,00	772.261.530,00	94,35
02.2.02.35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	163.900.000,00	156.129.600,00	95,26
02.2.02.36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	357.920.000,00	277.284.000,00	77,47

02.2.02.38		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3.800.000.000,00	3.748.926.034,00	98,66
02.2.02.40		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	364.540.000,00	362.125.500,00	99,34
02.2.02.41		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	162.260.000,00	145.754.000,00	89,83
02.2.02.42		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	199.760.000,00	188.960.000,00	94,59
02.2.02.44		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	527.005.000,00	518.284.800,00	98,35
02.2.02.46		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.614.620.000,00	3.581.127.000,00	99,07
02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	50.000.000,00	45.310.000,00	90,62
02.2.03.02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000,00	45.310.000,00	90,62
02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.100.000,00	85.175.000,00	98,93
02.2.04.03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	86.100.000,00	85.175.000,00	98,93
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		2.792.660.900,00	1.831.851.500,00	65,60
03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	242.655.000,00	174.675.000,00	71,98
03.2.02.03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	242.655.000,00	174.675.000,00	71,98
03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.550.005.900,00	1.657.176.500,00	64,99
03.2.03.01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.550.005.900,00	1.657.176.500,00	64,99
04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		503.831.000,00	502.186.300,00	99,67
04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.730.000,00	86.515.000,00	99,75
04.2.01.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.730.000,00	86.515.000,00	99,75

04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	235.062.000,00	235.062.000,00	100,00
04.2.03.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	235.062.000,00	235.062.000,00	100,00
04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	182.039.000,00	180.609.300,00	99,21
04.2.06.01		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	182.039.000,00	180.609.300,00	99,21
05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		3.420.093.000,00	3.319.974.162,00	97,07
05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.100.000,00	174.680.000,00	76,58
05.2.01.01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	228.100.000,00	174.680.000,00	76,58
05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	599.400.000,00	99,90
05.2.02.01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	600.000.000,00	599.400.000,00	99,90
05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.591.993.000,00	2.545.894.162,00	98,22
05.2.03.01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.591.993.000,00	2.545.894.162,00	98,22
			628.534.274.486,00	607.158.005.609,49	96,60

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sudah berupaya dengan optimal dan telah melaksanakan program serta kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran dinas kesehatan kesehatan “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, seluruh indikator sasaran telah memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori sangat baik. Sasaran “meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” serta “Angka Usia Harapan Hidup dan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”.
2. Dari analisis 9 (Sembilan) indikator program, 8 (delapan) indikator program dapat dicapai sesuai target dan 1 (satu) indikator program belum dapat dicapai serta dari 24 (dua puluh empat) indikator kegiatan, 21 (dua puluh satu) indikator kegiatan dapat dicapai sesuai target dan 3 (tiga) indikator kegiatan belum dapat dicapai.
3. Realisasi kinerja anggaran (keuangan) Dinas Kesehatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 96.60% dengan predikat sangat baik.

Langkah-langkah/ Strategi yang akan diambil Dinas Kesehatan yang dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fungsi Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar, serta Rumah Sakit sebagai pelayanan lanjutan serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pelibatan multistakeholder.
2. Meningkatkan peran serta lintas sektor dan lintas program dalam upaya pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

3. Pemenuhan pemenuhan SDM Kesehatan di puskesmas sesuai standar, khususnya untuk pemenuhan program prioritas.
4. Penguatan perencanaan obat, penguatan e-catalog, penjaminan ketersediaan obat esensial education penggunaan obat rasional.
5. Peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait faktor risiko penyakit tidak menular dan peningkatan skrining dan deteksi dini penyakit tidak menular serta penyakit menular di FKTP dan jejaringnya.
6. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, sehingga program dan kegiatan yang ddapat lebih mendukung pada pencapaian sasaran.
7. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan yang bermutu.
8. Percepatan akreditasi Rumah Sakit Tani Nelayan Tasikmalaya dalam meningkatkan pelayanan dan peran Rumah sakit dalam memberikan pelayanan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN

Kawasan Komplek Perkantoran Setda Kabupaten Tasikmalaya
Jl. Sukapura Desa Sukaasih Telp/Fax (0265) 2553153
Email : dinkes@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : KS.01/ 87 /Dinkes/2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Mengumpulkan dan memonitoring data realisasi kinerja.
2. Menganalisis data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 5 Desember 2023

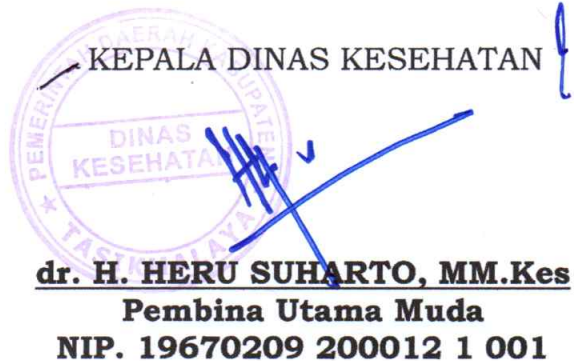

KEPALA DINAS KESEHATAN
dr. H. HERU SUHARTO, MM.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670209 200012 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TASIKMALAYA
NOMOR : KS.01/KEP. /Dinkes/2023
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

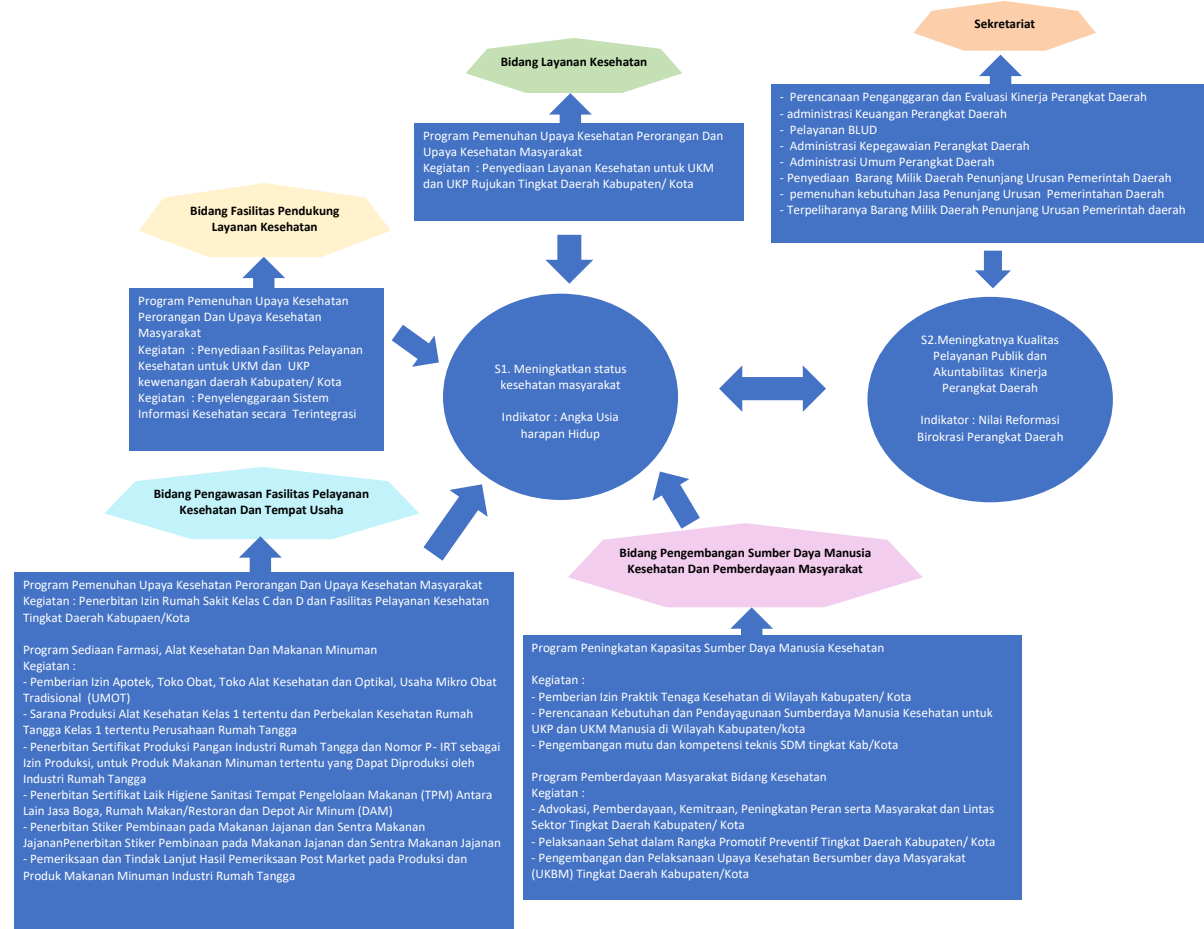
1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan
2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
3. Koordinator : Perencana Ahli Muda
4. Anggota :
1. Kepala Bidang Layanan Kesehatan
 2. Kepala Bidang Fasilitasi Pendukung Layanan Kesehatan
 3. Kepala Bidang Bidang Pengawasan Pasilitan Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha
 4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 5. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. H. HERU SUHARTO, MM.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670209 200012 1 001

Crosscutting Internal Dinas Kesehatan



Kepala Dinas Kesehatan

HERU SUHARTO, MM.Kes.
NIP. 19670209 200012 1 001

Crosscutting Eksternal Dinas Kesehatan

